

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik (Parpol) merupakan fenomena umum dalam kehidupan berdemokrasi dan keberadaannya memiliki arti yang sangat penting. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya partai politik. Partai politik sebagai perantara yang menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi serta mengaitkannya dengan aksi politik yang lebih luas di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional.¹

Dengan demikian partai politik berperan besar dalam proses seleksi baik pejabat publik maupun substansi kebijakan.² Adapun pengertian tentang partai politik yang dikemukakan oleh Edmund Burke yang dikutip oleh Cheppy Haricahyono, bahwa partai politik ialah “*A group of men who had agreed upon a principle by which the national interest might be served*”. Partai politik merupakan sekelompok manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk mengabdikan dan melindungi kepentingan nasional.³

Dalam sistem *representative democracy*, harus dimengerti bahwa partisipasi rakyat yang berdaulat terutama disalurkan melalui pemungutan suara

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2009, hlm. 403.

² Robert Morrison Maciver, *The Modern State*, First Edition, Oxford University Press, London: 1955, hlm. 194. Dikutip dari Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 4, Desember 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 7.

³ Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Tiara Wacana, Yogyakarta: 1986, hlm. 219.

rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dianggap cukup efektif dengan maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peranan partai politik dianggap dominan.⁴

Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader berpotensi untuk menjadi pemimpin negara pada jenjang dan posisi tertentu. Kader-kader tersebut, ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh dewan perwakilan rakyat. Tentu tidak semua jabatan dapat diisi oleh partai sebagai sarana rekrutmen politik.

Jabatan-jabatan profesional dibidang kepegawai-negerian dan lain-lain yang tidak bersifat politik (*political appointment*), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula. Pemilihan umum menjadi wahana pertarungan partai untuk mendapatkan jabatan publik tersebut.

Di negara yang tidak memiliki partai politik dapat disebut sebagai negara yang tidak memiliki sarana kelembagaan dalam suksesi kepemimpinan guna mendorong perubahan yang terus-menerus dan menyerap segala gejolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Oleh sebab itu, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi.

⁴ Lihat Dawn Oliver, *Constitutional Reform in the UK*, London: Oxford University Press, London: 2003, hlm. 35. Dikutip dari Jurnal Konstitusi, *Op. Cit.*, hlm. 8

⁵ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Masyarakat Yang Sedang Berubah*, CV Rajawali, Jakarta: 1983, hlm. 263.

Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Karena itu partai politik merupakan pilar dalam sistem politik yang demokratis.⁶ Bahkan banyak yang mengatakan bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.⁷ Bersamaan dengan semakin berperannya Parpol dalam kehidupan negara yang demokratis, mulai timbul konflik-konflik dalam tubuh Parpol baik itu konflik sosial maupun konflik politik.

Konflik politik yang terjadi dalam partai politik harus disikapi dengan penuh kebijaksanaan, karna bagaimanapun suatu organisasi takkan lepas dari proses dinamika dan konflik. Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri-ciri serupa, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik yakni mempunyai keterkaitan dengan negara atau pemerintah, para pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan.⁸

Konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.⁹ Sebagai aktivitas politik, konflik merupakan suatu jenis interaksi (*interaction*) yang ditandai dengan bentrokan atau benturan kepentingan, gagasan,

⁶ Schattschneider, E.E, *The Semisovereign People: A realist's view of democracy in America*, Illionis: The Dryden Press Hinsdale, 1975. Dikutip dari Jurnal Konstitusi, *Op.Cit.*, hlm. 8

⁷ Bahkan oleh Yves Meny and Andrew Knapp dikatakan "*A democratic system without political parties or with a single party is impossible or at any rate hard to imagine*". Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, Third Edition Oxford University Press, 1968, hlm. 86. Dikutip dari Jurnal Konstitusi, *Op.Cit.*, hlm.7

⁸ Huntington, *Op.Cit.*, hlm. 268

⁹ Simon Fisher, *Mengelola konflik-Keterampilan & Strategi*, The british Council, 2001. hlm. 4

kebijaksanaan, program, dan pribadi atau persoalan dasar antara beberapa kelompok yang saling bertentangan.¹⁰ Dengan demikian, makna benturan diantara kepentingan tadi, dapat digambarkan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu serta kelompok dengan pemerintah.

Perjalanan kehidupan partai politik di Indonesia sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti bagaimana partai politik mengorganisir dirinya agar terbebas dari ancaman perpecahan, bagaimana hubungan antara partai politik dengan massa pendukungnya, bagaimana peranan ideologi di dalam kehidupan partai untuk memperoleh sarana materil, serta bagaimana peranan partai politik bagi kelanacaran perputaran mesin partai.¹¹

Konflik internal partai, sering terjadi akhir-akhir ini. Kecenderungan terjadinya konflik internal Parpol semakin meningkat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹² Persamaan kehendak dan cita-cita yang menyatukan anggota partai, namun partai politik tidak akan bisa menghindari terjadinya konflik. Konflik internal partai politik disebabkan banyak hal, salah satunya tidak adanya kesamaan kehendak dan cita-cita atau karena anggota partai yang tidak percaya akan kepemimpinan pemimpinnya.

Sesungguhnya konflik politik yang terjadi dalam sebuah Parpol merupakan sebuah kewajaran dalam proses dinamika,¹³ namun kita dapat pula membatasi apakah proses tersebut merupakan konflik atau hanya persaingan saja

¹⁰ *Ibid.*, hlm, 147

¹¹ Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 405

¹² *Ibid.*, hlm 407

¹³ Haricahyono, *Op.Cit.*, hlm. 223

dengan cara membuat identifikasi mengenai konflik internal Parpol itu sendiri. Fenomena konflik internal Parpol di Indonesia sangat lazim terjadi dan semakin kentara terlihat ketika era pasca reformasi.

Beberapa konflik Parpol yang menarik perhatian masyarakat Indonesia di antaranya dapat dicontohkan Parpol berasaskan Pancasila seperti kasus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan contoh yang paling jelas. Dalam tubuh PDI berulang kali terjadi konflik dan konflik itu merupakan rekayasa dari pemerintah melalui aparatnya untuk melemahkan partai dan mencari pengurus yang akomodatif terhadap Soeharto.

Berulang kali konflik internal terjadi, sejak masa kepemimpinan Sanusi Hardjadinata, yang kemudian berlanjut dalam kepemimpinan Hardjanto, sampai kepengurusan Suryadi konflik seolah enggan pergi dari Partai Demokrasi Indonesia di bawah pimpinan Suryadi.¹⁴ Di sisi lain partai-partai Islam pun juga tidak dapat lepas dari cengkraman konflik internal. Perpecahan kembali melanda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat kisruh soal jabatan rangkap Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf yang diangkat menjadi menteri dalam kabinet Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla.

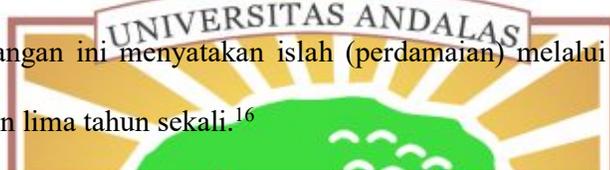
Gus Dur kembali menunjuk pengganti Alwi Shihab yaitu Muhaimin Iskandar sedangkan kubu Alwi dan Syaifullah tetap bersikukuh menjadi pengurus, dengan dukungan para ulama khos. PKB versi Alwi inilah yang menjadi cikal bakal munculnya PKNU.¹⁵ Ini juga menandakan keprihatinan kalangan ulama

¹⁴ Syaukani et.al, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta: 2002, hlm. 134

¹⁵ Firman Noor, *Perpecahan dan Soliditas Partai di Indonesia kasus PKB dan PKS di dekade awal Reformasi*, LIPI Press, Jakarta: 2015, hlm 36.

terhadap konflik dalam tubuh PKB dan perubahan sikap ulama dalam mendukung Gusdur.

Dualisme kepemimpinan terjadi yang ketiga kalinya melibatkan kubu Syaifulloh Yusuf yang di dukung Choirul Anam dengan kubu Muhaimin Iskandar yang didukung oleh Gus Dur sampai pada Partai Bintang Reformasi (PBR) yang pecah menjadi dua kubu saat suksesi pemilihan ketua umum partai, yakni kubu Zainuddin MZ dengan kubu Zainal Ma'arif walaupun pada akhirnya kedua kubu yang berseberangan ini menyatakan islah (perdamaian) melalui muktamar yang diselenggarakan lima tahun sekali.¹⁶



Lain PKB, lain lagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS mampu menjaga soliditas partai. Walau terdapat perbedaan pendapat, maupun konflik internal namun tidak sampai berpengaruh terhadap soliditas partai. Walaupun terdapat beberapa kasus pemecatan kader senior partai yang memegang jabatan penting dalam tubuh partai seperti Syamsul Balda yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden PK dan anggota Majelis Syuro dan Yusuf Supendi anggota Majelis Syuro dan wakil ketua Dewan Syariah PKS.¹⁷

Namun tidak sampai melahirkan oposisi dalam tubuh partai atau eksodus besar-besaran pengurus partai, apalagi melahirkan partai baru. Konflik akibat pemecatan kader yang tidak selesai di internal partai dan berlanjut ke pengadilan sebagai sarana di luar partai ditemukan dalam kasus Yusuf Supendi dan baru-baru ini pada kasus yang menimpa Fahri Hamzah yang coba dirotasi dari posisinya

¹⁶Chudry Sitompul, *Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multipartai di Indonesia*, Jurnal Legislasi, Vol 5, No 1, September. 2010, hlm 10.

¹⁷*Ibid.*

sebagai Wakil Ketua DPR RI. Namun akhirnya Fahri Hamzah berhasil memenangkan atas kasus gutatan Partai Keadilan Sejahtera terhadapnya¹⁸

Konflik internal yang terjadi di beberapa partai besar dalam skala nasional ternyata juga dialami oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai ini berdiri tak lepas dari gagasan Wiranto beserta tokoh-tokoh nasional lainnya. Konflik ini dipicu oleh kebijakan kontroversional yang diterapkan oleh Oesman Sapta Odang (OSO) yang menjabat sebagai ketua umum Partai Hanura.

Oesman merupakan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selain menjadi ketua DPD RI Oesman Sapta Odang merupakan seorang pengusaha sukses sekaligus politisi ulung karna juga pernah menjabat menjadi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Tahun 2016 Oesman Sapta Odang di tunjuk secara aklamasi pada musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kamis 22 Desember 2016 di kantor dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Hanura,¹⁹ menggantikan posisi Wiranto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Setelah resmi menggantikan posisi Wiranto Oesman Sapta Odang malah membuat kebijakan untuk mengajak dan memasukkan anggota DPD sebagai pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Hanura. Kebijakan ini mulai menuai kritikan dari tokoh senior Partai Hanura namun, Oesman Sapta Odang tidak peduli dan tetap menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Setahun lebih

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹Tempo.com, diakses di <https://nasional.tempo.com>. *Pimpin Hanura, Oesman Sapta Tegaskan Dukung Jokowi Pada Pemilu 2019*, tanggal 17 September 2018 pukul 17.24 WIB

berselang atau tepatnya 15 Januari 2018 beberapa pengurus DPP dan DPD Partai Hanura berkumpul lewat rapat pleno.²⁰

Perwakilan dewan pembina dan dewan kehormatan Partai Hanura turut hadir dalam pleno yang diselenggarakan tersebut, hasil pleno menyetujui pemecatan Oesman Sapta Odang sebagai ketum yang sah dan sudah ditandatangani sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu, 14 Januari 2018. Alasan utamanya, mosi tak percaya dari 27 DPD dan 400 DPC yang minta pergantian Oesman Sapta Odang dari posisi ketua umum,²¹ di landasi adanya mosi tak percaya, ini dikarenakan kader daerah tak cocok dengan gaya kepemimpinan Oesman Sapta Odang yang sering menebar ancaman.

Selain itu faktor elektabilitas partai juga cenderung menurun sejak dipimpin wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut. Pemecatan Oesman Sapta Odang ini memunculkan dualisme kepemimpinan, Oesman Sapta Odang dipecat kemudian di tunjuk wakil ketua umum Daryatmo sebagai pelaksana tugas ketua umum. Sejak lahirnya keputusan pleno yang disepakati oleh sebagian besar pengurus DPD dan DPP Partai Hanura terkait pemecatan ketua umum Oesman Sapta Odang.

Keputusan ini malah menjadi awal mula perpecahan kepengurusan Hanura di tingkat pusat. Dari kubu Sarifuddin Sudding yang menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum Daryatmo ingin menggeser Oesman Sapta Odang dari posisi ketua umum Partai Hanura. Sementara itu ada barisan lainnya tidak setuju

²⁰Detik.com, diakses di <https://.detik.com>. *Oesman Sapta Resmi Jadi Ketua Umum Hanura*. tanggal 18 September 2018 pukul 16.34 WIB.

²¹Kompas.com, diakses di <https://nasional.kompas.com>. *Pengurus Hanura Ajukan Mosi Tak Percaya pada Oesman Sapta diberhentikan*. tanggal 18 September 2018 pukul 14.23 WIB.

terhadap pemecatan Oesman Sapta Odang.²² Perihal rencana tindak lanjut pemecatan Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum forum rapat pleno sepakat untuk melaksanakan Munaslub, alasannya Munaslub hanya diperlukan untuk mengesahkan ketua umum definitif pengganti Oesman Sapta Odang.

Merujuk pada anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) Partai Hanura, pemecatan Oesman Sapta Odang diklaim sudah sesuai dengan aturan partai yaitu AD pasal 48 tentang musyawarah dan rapat tingkat pusat serta diperjelas lagi dalam ART pasal 26 mengenai ketentuan musyawarah nasional luar biasa.²³ Tak terima dengan keputusan tersebut, ketua umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang memutuskan memecat sekretaris jendral Sarifuddin Sudding kemudian menunjuk Herry Lotung Siregar sebagai pengganti Sudding.²⁴

Oesman menjadikan hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Hanura yang dilaksanakan di Bali 4-6 Agustus 2017 sebagai landasan melakukan pemecatan terhadap sekretaris jendral.²⁵ Rapimnas ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan Partai Hanura di seluruh wilayah Indonesia, Rapimnas berhasil menyepakati beberapa kesepakatan di antaranya pertama berisi tentang memberikan mandat penuh kepada Oesman Sapta Odang selaku ketua umum untuk melakukan pergantian pengurus, “hasil Rapimnas memberikan mandat

²² Kompas., *Op.Cit.*

²³Lihat Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura Pasal 26 tentang ketentuan musyawarah nasional luar biasa ayat 2 point C dan E. Munaslub dapat diselenggarakan apabila ketua umum melanggar Anggaran Dasar Rumah Tangga dan didukung sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah dan 2/3 Dewan Pimpinan Cabang, diakses dari partaihanura.or.id tanggal 15 Desember 2018 pukul 15.08 WIB

²⁴Merdeka.com, diakses <http://merdeka.com>, *Pecat Sarifuddin Sudding, OSO Tunjuk Hery Lontung Jadi Sekjen Hanura*, tanggal 29 Agustus 2018 pukul 17.43 WIB.

²⁵ Partaihanura.or.id, diakses di <http://m.partaihanura.or.id>, *Hasil RAPIMNAS Partai Hanura Bali 2017*, tanggal 7 Agustus 2018 pukul 20.29 WIB.

penuh kepada ketua umum Oesman Sapta Odang untuk melakukan restrukturisasi, reposisi, revitalisasi kepengurusan DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020.²⁶

Konflik elit antara kubu Oesman Sapta Odang dan kubu Sarifuddin Sudding berimbas panjang sampai ada pemecatan terhadap ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat, namun pada tanggal 23 Januari 2018 ketua dewan pembina Wiranto memediasi kedua kubu yang sedang berseteru untuk menemukan kata islah.²⁷ Wiranto juga mengatakan bahwa kedua belah pihak telah mengakui kebenarannya.

Islah²⁸ yang di mediasi oleh mantan ketua umum Partai Hanura yaitunya Wiranto menghasilkan beberapa kesepakatan di antaranya. Pertama mengembalikan struktur kepengurusan partai sesuai dengan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2016.²⁹ Kedua akan membentuk tim untuk mengakomodasi sejumlah nama dalam mengembalikan struktur kepengurusan yang mampu mengakomodir kepentingan kedua kubu.

Namun kesepakatan yang dihasilkan dalam proses islah tersebut tidaklah dilaksanakan oleh kubu Oesman Sapta Odang, ini dibuktikan dengan tetap dipecatnya beberapa pengurus DPD Hanura di tingkat provinsi dan beberapa anggota DPRD baik tingkat kabupaten atau kota. Salah satu daerah yang terkena



²⁶Viva. Com, diakses <https://Viva.com>. *Makin Panas Oso Pecat Sarifuddin Sudding dari Sekjen Hanura*, tanggal 10 Agustus 2018 pukul 15.25 WIB.

²⁷Tribunnews.com, diakses dari <http://kupang.tribunnews.com>, *Wiranto Damaikan Kubu Oesman Sapta dan Daryatmo, Konflik Hanura Selesai*. Tanggal 12 Agustus 2018 pukul 21.00 WIB.

²⁸Islah berarti perdamaian (tentang penyelesaian pertikaian dan sebagainya), diakses dari <https://kbbi.web.id/islah.html>, tanggal 11 Januari 2018 pukul 09.15 WIB.

²⁹Detik.com, diakses dari <http://detik.com>, *Islah Terganjil, Hanura 'Abhara' Minta Kubu Oso Setop Pecat Pengurus*, tanggal 27 Agustus 2018 pukul 21.24 WIB.

dampak besar dari konflik politik yang dialami Partai Hanura yaitu kepemimpinan DPD Partai Hanura di Sumatera Barat yang berasal dari kepemimpinan Marlis.

Berdasarkan hasil islah kepemimpinan di tingkat pusat antara kubu Oesman Sapta Odang dan Sarifudin Sudding maka pemecatan yang dilakukan terhadap kader Hanura di seluruh Indonesia harus dicabut sesuai keputusan dan kesepakatan islah,³⁰ namun di beberapa provinsi kepemimpinan Hanura kesepakatan islah ini tidak dijalankan sepenuhnya. Salah satu daerah yang tidak dikembalikan struktur kepengurusannya seperti surat keputusan (SK) tahun 2016 yaitu kepemimpinan DPD Hanura Sumatera Barat.

Ketua DPD Hanura Sumatera Barat tetap diganti dan yang lebih parah ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat yang baru malah mendapatkan SK dari Oesman Sapta Odang selaku ketua umum. Konflik yang terjadi di tingkat pusat dalam dualisme kepemimpinan Hanura sudah menemui titik temu lewat proses islah di tingkat pusat namun konflik politik dalam kepemimpinan DPD Hanura di Sumatera Barat masih terjadi dengan puncak adanya pemecatan 10 orang anggota DPRD satu orang ketua DPC Partai Hanura di Sumatera Barat.³¹

Penulis berasumsi bahwa di internal DPD Hanura Sumatera Barat konflik masih berlangsung dan belum terselesaikan sebagai implikasi antara dualisme kepemimpinan pusat, walaupun sudah ada kesepakatan islah antara dua kubu ini di tingkat pusat namun kesepakatan ini tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh kubu Oesman Sapta Odang tentu akan berdampak pada kepemimpinan di DPD Hanura di Sumatera Barat.

³⁰Detiknews.com diakses dari <http://detik.com>, *Islah, Kepengurusan Hanura Kembali ke Munaslub*. tanggal 30 Agustus 2018, pukul 20.23 WIB.

³¹*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Tarik ulur kepentingan dalam partai seringkali menyebabkan terjadinya konflik internal sebuah Parpol. Peran penting Parpol dalam pemerintahan dewasa ini membuat Parpol juga tidak terlepas dari konflik kepentingan baik secara eksternal maupun secara internal.³² Disatu sisi konflik ini bisa saja menimbulkan situasi dinamis dalam tubuh Parpol itu sendiri namun di sisi lain Parpol dapat saja mengalami kemunduran akibat instabilitas dalam tubuh partainya.

Menarik untuk disimak bahwasanya Parpol dapat berperan menjadi sebuah sistem konflik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: pertama, terjadi hubungan eksploitasi dimana terdapat tujuan pribadi seseorang dalam Parpol.³³ Kedua, terjadi hubungan eksploitasi dimana terdapat tujuan Parpol yang memanfaatkan orang itu. Kenyataannya konflik yang kerap bersentuhan dengan Parpol, membuktikan bahwa setiap Parpol dalam tindakannya akan berorientasi untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui mekanisme pemilu.

Idealisme partai politik yang menghendaki partai berperan sebagai lokomotif dalam perubahan sosial politik ternyata dibelokkan menjadi sarana mencapai kekuasaan semata. Orientasi perjuangan partaipun tidak lagi mengakar pada rakyat, tetapi lebih menggantung pada kekuasaan.³⁴ Perebutan kekuasaan yang terjadi, seringkali individu-individu dalam Parpol memiliki kepentingan yang

³² Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Jakarta: 1998, hlm. 38

³³ *Ibid.*, hlm. 79.

³⁴ Kompas.com, diakses di <https://kompas.nasional.com>. *Menakar Idealisme dan Hasrat Kekuasaan Partai*. Tanggal 11 September 2018 pukul 15.56 WIB

berbeda-beda sehingga tidak jarang muncul tensi (ketegangan) bahkan tahapan lebih lanjut dapat menjadi konflik internal Parpol.³⁵

Sesungguhnya proses ini menunjukkan kewajaran dalam sebuah Parpol karena merupakan sebuah dinamika namun kita dapat pula membatasi apakah proses tersebut merupakan konflik atau hanya persaingan saja dengan cara membuat identifikasi mengenai konflik internal Parpol itu sendiri.³⁶ Konflik internal yang terjadi antara tataran elit Partai Hanura ternyata memiliki dampak yang cukup besar dalam struktur kepengurusan di tingkat DPD.

Dualisme kepengurusan ini bermula dengan munculnya mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan ketua umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan mengangkat Daryatmo sebagai pelaksana tugas ketua umum. Dalam kasus konflik internal yang mendera partai yang diprakarsai oleh jenderal purn Wiranto ini juga berdampak luas sampai di tingkat daerah.

Salah satu daerah yang jelas-jelas terkena dampak dari konflik yaitunya kepengurusan Hanura di Sumatera Barat, dualisme yang terjadi pada Partai Hanura di Sumatera Barat, membuat 10 kader yang kini duduk di kursi DPRD, harus kosong sesaat karna dipecat status keanggotaannya oleh ketua umum Oesman karna sebelumnya mereka malah mendukung untuk pemecatan Oesman Sapta Odang yang di promotori oleh sekretaris jenderal Sarifuddin Sudding.³⁷

³⁵Parpol pada awalnya terbentuk dari kesamaan nilai, visi dan misi dari individu-individu di dalamnya namun ketika konflik internal parpol terjadi, hal ini menunjukkan terdapat perbedaan nilai dan kepentingan secara signifikan di antara anggotanya.

³⁶Lebih jelas, pembatasan konflik internal parpol dalam penelitian ini dapat dibaca pada kepustakaan konseptual

³⁷ Kumparan.com diakses dari <https://m.kumparan.com>, *Dualisme Partai Hanura, 10 Kursi DPRD di Sumatera Barat butuh PAW*, tanggal 01 September 2018 pukul 21.00 WIB.

Pemecatan yang terjadi terhadap sepuluh pengurus yang sekaligus anggota perwakilan rakyat di tingkat daerah tentu harus ditindaklanjuti dengan adanya pergantian antar waktu (PAW), hal ini dikarenakan dari 48 anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang merupakan kader Partai Hanura turut terpecah. Mantan ketua DPD Hanura Sumatera Barat mengatakan konflik di internal Partai Hanura antara kubu Oesman Sapta Odang dengan kubu Daryatmo membuat kader partai terpecah-belah.

Konflik ini bahkan berujung pada pemecatan 10 orang anggota DPRD yang berasal dari Partai Hanura, 10 orang yang di pecat itu di antaranya Marlis anggota DPRD Sumatera Barat, Yendril, Zaharman dan Osman Ayub anggota DPRD kota Padang, anggota DPRD Pesisir Selatan, Syariato dan Erniwati. Dari Kota Solok Selatan Marwan Efendi dan Afdal, anggota DPRD Dhamasraya dan yang terakhir anggota DPRD Tanah Datar Yuni Darlis.³⁸

Tabel 1.1
Daftar 10 Anggota DPRD Yang di Pecat

No	Unsur	Nama	Jabatan/institusi
1.	Anggota DPRD Prov. Sumbar	Marlis	Mantan Ketua DPD Hanura Sumbar
2.	Anggota DPRD kota Padang	Yendril	Mantan Fungsiaris DPC Hanura kota Padang
3.	Anggota DPRD kota Padang	Osman Ayub	Mantan Fungsiaris DPC Hanura kota Padang
4.	Anggota DPRD Kota Padang	Zaharman	Mantan Fungsiaris DPC Hanura kota Padang
5.	Anggota DPRD Pesisir Selatan	Syariato	Mantan Fungsiaris DPC Hanura Kab. Pesisir Selatan

³⁸Kumparan.com, diakses di <https://m.kumparan.com>. *Dualisme Partai Hanura, 10 kursi DPRD di Sumatera Barat butuh PAW*. Tanggal 13 September 2018 pukul 13.53 WIB.

6.	Anggota DPRD Pesisir Selatan	Erniwati	Mantan Fungsionaris DPC Hanura Kab. Pesisir Selatan
7.	Anggota DPRD Solok Selatan	Marwan Efendi	Mantan Fungsionaris DPC Hanura Kab. Solok Selatan
8.	Anggota DPRD Solok Selatan	Afdal	Mantan Fungsionaris DPC Hanura Kab. Solok Selatan
9.	Anggota DPRD Dharmasraya	Herman	Mantan Fungsionaris DPC Hanura Kab. Dharmasraya
10.	Anggota DPRD Tanah Datar	Yuni Darlis	Mantan Fungsionaris DPC Hanura Kab. Tanah Datar

Sumber : Diolah Peneliti dari media [hanura](#), [detik](#), dan [kompas](#)

Orang-orang yang dipecat ini merupakan pengurus Partai Hanura versi Munaslub di bawah pimpinan Daryatmo. Selain 10 nama di atas sebenarnya ada satu orang lagi pengurus Hanura yang dipecat tepatnya ketua DPC Partai Hanura yaitu Fefrizal.³⁹ Ketua DPC kota Padang diganti karena dimosi tidak percaya oleh sembilan dari sebelas pimpinan anak cabang (PAC). Adapun alasan mosi tidak percaya kepada saudara mantan ketua DPC tersebut karena Fefrizal tidak lagi akomodatif dengan PAC Kota Padang.

Maka dari itu, DPP menunjuk Elvi Amri menjadi ketua DPC Partai Hanura Kota Padang masa bakti 2016-2021.⁴⁰ Akibatnya nama-nama tersebut tidak bisa mendaftar sebagai calon anggota legislatif ke komisi pemilihan umum (KPU) baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota, karena tidak mengantongi surat keputusan (SK) Kemenkumham. Jika kita merujuk kepada kesepakatan islahnya Partai Hanura tanggal 23 Februari 2018

³⁹Padang Ekspres.com, diakses di <http://padangekspres.com>, Fauzi: *Fefrizal di pecat, Bukan Mundur*, tanggal 23 Oktober 2018

⁴⁰ *Ibid.*

Partai Hanura yang telah didamaikan oleh ketua dewan pembina Partai Hanura Wiranto.

Kesepakatan damai Islah inipun telah di umumkan setelah dua kubu melakukan pertemuan di Hotel Ritz-Carlton atas mediasi oleh ketua dewan pembina. Kesepakatan yang dilahirkan yaitu mengembalikan kepengurusan Hanura sesuai dengan SK 2016. Kesepakatan ini, ternyata tidak dijalankan di tingkat pengurus DPD Sumatera Barat karena tertanggal 21 Mei 2018 sekretaris DPD Partai Hanura Sumbar Fauzi Novaldi malah menjemput SK pemberhentian dan keputusan penggantian Marlis sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan SK nomor: SKEP703/DPP-HANURA/VI/2018 tentang pemberhentian ketua DPD Hanura Sumbar Marlis sebagai anggota Partai Hanura.⁴¹

Dengan surat keputusan tersebut, Oesman Saptu Odang atas nama pimpinan partai memecat Marlis dan mencabut kartu tanda anggota (KTA) partai sekaligus meminta Marlis untuk mengembalikan seluruh aset Partai Hanura. Dari penjelasan atas fenomena yang terjadi maka peneliti menganggap bahwa konflik internal yang terjadi dalam tubuh Partai Hanura belum selesai di tingkat DPD Sumatera Barat karena setelah islahnya kepengurusan di tingkat pusat namun, masih terjadi pemecatan terhadap kader-kader kubu Daryatmo di tingkat Sumatera Barat.

Untuk itu peneliti akan mencoba untuk menjelaskan konflik politik dalam kepengurusan DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Barat dengan rumusan

⁴¹ Harianhaluan.com, diakses di <https://www.harianhaluan.com>. *Dukung pencopotan OSO, Marlis didepak dari ketua DPD Hanura Sumbar*. Tanggal 13 September 2018 pukul 15.34 WIB.

pertanyaan yaitu mengapa konflik politik terjadi dalam kepengurusan DPD Partai Hanura Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka tujuan dari penelitian ini terdiri dari beberapa hal yaitu

1. Menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik politik di DPD Partai Hanura Sumatera Barat.
2. Menjelaskan implikasi konflik politik terhadap kepengurusan DPD Partai Hanura Sumatera Barat.

2. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian dalam penelitian tentang konflik politik ini dilihat dari dua sisi yaitu:

2.1. Manfaat akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran tentang perkembangan konsep konflik politik dan faktor-faktor penyebab konflik. Kemudian dari penelitian ini juga diharapkan mampu menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya-karya ilmiah tentang konflik politik, serta menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang relevan.

2.2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi partai politik dalam meminimalisir penyebab

konflik internal sehingga mampu melahirkan solusi-solusi secara maksimal dapat dijadikan sebagai tambahan referensi oleh pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan dalam suatu partai politik yang terlibat dalam dinamika dalam kepengurusan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

